

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2007.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2006.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Cetakan Kedua. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma, 2010.
- Koesnoe, Mohammad. *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Airlangga University Press, 1979.
- Loudoe, John Z. *Penemuan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*. Bina Aksara, 1985.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Kencana Prenada, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama. Universitas Atma Jaya, 2010.
- _____. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum)*. Cetakan Ketiga. Rajawali Pers, 2024.
- Pontier, J.A. *Penemuan Hukum, Penerjemah: Arief Sidharta*. Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Windia, Wayan P. *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*. Cetakan Pertama. Aksara Bali, 2017.
- _____. *Mengenal Hukum Adat Bali*. Pustaka Ekspresi, 2023.
- _____, dan I Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Cetakan Kedua. Swasta Nulus bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali LPPM Unud, 2016.

_____, Ni Made Wiasti, dan Ni Luh Arjani. *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. Udayana University Press, 2012.

Jurnal

Arta, I Komang Kawi, Ketut Sudiatmaka, dan Ratna Artha Windari. “Realisasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng.” *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 1 (2018).

Ayupratiwi, Ni Luh Putu Lusi, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Komang Febrinayanti Dantes. “Implementasi Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA–BALI/VIII/2023 atas Hak Waris Anak Perempuan di Desa Adat Lumbanan.” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 2 (2025).

Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group, 2011.

Engle Merry, Sally. “Legal Pluralism.” *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–96. <https://doi.org/10.2307/3053638>.

Griffiths, John. “What Is Legal Pluralism?” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

Hakim, Achmad Caesar Luthful, dan Sartika Intaning Pradhani. *Penerapan Pendekatan Formalistik dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah*. 7, no. 1 (2021).

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, 2022.

Nalle, Victor Imanuel W. “Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman).” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018): 436. <https://doi.org/10.22146/jmh.37201>.

Pradhani, Sartika Intaning. “Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

_____. “Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan.” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.420>.

- Pratama, I Wayan Bhayu Eka, Dhea Nandita, dan Indah Ratnasari. “Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.78>.
- S, Dedy Yudhistira. “Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 87–113. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.
- Sudantra, I Ketut, Ni Nyoman Sukerti, dan A.A. Istri Ari Atu Dewi. “Pengaturan Perkawinan Pada Gelahang dalam Awig-Awig Desa Pakraman.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p12>.
- Sulastriyono, Sulastriyono, dan Sartika Intaning Pradhani. “Pemikiran Hukum Adat Djodjodigoeno dan Relevansinya Kini.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018): 448. <https://doi.org/10.22146/jmh.36956>.
- Tamanaha, Brian Z. “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global.” *Sydney Law Review* 29, no. 07 (2007). <https://ssrn.com/abstract=1010105>.
- Von Benda-Beckmann, Keebet. “Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra.” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 13, no. 19 (1981): 117–59. <https://doi.org/10.1080/07329113.1981.10756260>.
- Widiadnyani, I Gusti Ayu. “Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender.” *Jurnal Aktual Justice* 7, no. 2 (2022): 88–105. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i2.945>.

Laporan Penelitian

- Anugrah, Apriana Rifma. “Analisis Putusan Hakim dalam Penerapan Hak Waris Anak Perempuan Pada Keekerabatan Patrilineal (Studi Putusan Nomor 1130 K/Pdt/2017, 573 K/Pdt/2017, dan 2348 K/Pdt/2018).” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2024.
- Arpin, L.P. Febbi Pratiwi. “Hak Anak Perempuan yang Kawin dan Mengikuti Suami terhadap Harta Kekayaan Orang Tuanya di Kota Denpasar.” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Fanny, Reggy Dio Geo. “Penerapan Pendekatan Adat Positivistik dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dan Perusahaan Tambang.” Penulisan Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Gunadi, Kadek Mahesa. “Implementasi Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali tentang Hak Waris Perempuan dalam Awig-Awig Desa Adat (Studi di Desa Adat Kota Denpasar).” Skripsi, Universitas Udayana, 2023.

Setyaningsih, Dwi Retno. “Analisis Yuridis pada Putusan Nomor 169/PDT.G/2014/PN.TAB dan Putusan Nomor 859/PDT.G/2014/PN.DPS.” Penulisan Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti, Tjitrosudibio.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3277).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

Keputusan Pasamuhan Agung Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pokok-pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali.

Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDPBali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 580 K/Pdt/1995.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766/K/Pdt/1998.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1885 K/Pdt/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2348 K/Pdt/2018.

Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 05/PDT/2014/PT.DPS.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2016/PT.DPS.

Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2012/PN.Srp.

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 116/Pdt.G/2013/PN.Sgr.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Tab.

Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp.

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Gin.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 834/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 80/Pdt.G/2023/PN.Bli.